

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampai saat ini, Indonesia masih tergolong negara yang sedang maju dan belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Dari beberapa banyak masalah sosial yang ada sampai saat ini, gelandangan dan pengemis adalah masalah yang perlu dan harus diperhatikan lebih dari pemerintah, karena saat ini masalah tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan kota-kota besar, terutama seperti Surabaya. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan penduduk metropolisnya yang mencapai 3 juta jiwa (Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya), Meskipun seperti itu, banyak juga warga Surabaya yang masih dalam kesulitan ekonomi. Banyak keluarga yang kurang mampu mendapat pendapatan yang lebih dan pada akhirnya berimbas pada anak-anak mereka.

Sebagai contoh, semakin besarnya derajat penderitaan kaum miskin di perkotaan karena mengalami marginalitas ekonomi, sosial maupun akses budaya. Menajamnya masalah-masalah sosial perkotaan seperti konflik sosial, karakter kejahatan, prostitusi, anak jalanan dan endemiknya amuk massa yang menyerang rasa tertib umum. Perubahan struktur demografi penduduk kota dengan meningkatnya warga lanjut usia. Relatif menurunnya usia produktif serta kelangkaan penyediaan lapangan kerja menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam pengelolaan kebijakan publik (Ahmad, 2002: 4)

Kegagalan pembangunan dan proses marginalisasi yang terjadi di wilayah pedesaan, bukan saja telah terbukti menimbulkan derasnya migrasi penduduk yang berlebihan di wilayah kota besar, tetapi juga setumpuk masalah sosial menyertainya. Seperti bisa kita lihat dalam lima tahun terakhir, kota-kota besar di Propinsi Jawa Timur khususnya Surabaya bukan saja diserbu arus migrasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu, tetapi di saat yang sama juga memicu munculnya berbagai permasalahan kota, seperti PKL, pemukiman kumuh, gelandangan, pengemis, tuna wisma, anak jalanan, PSK, dan lain - lain sebagainya.

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), alih-alih jumlahnya makin menurun, di lapangan yang terjadi justru perkembangan mereka tampak makin mencemaskan. Perkembangan anak jalanan yang ada di Surabaya, misalnya menurut prediksi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya, pada masa pasca krisis diperkirakan jumlahnya justru meningkat sekitar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2000, jumlah anak jalanan tercatat hanya 1.297 orang, maka pada tahun 2001 jumlah tersebut sudah melonjak dua kali lipat lebih menjadi 2.926 orang (Kompas, 5 Maret 2003).

Salah satu dampak dari kemiskinan adalah adanya anak jalanan, namun bukan berarti kemiskinan merupakan salah satunya faktor determinan yang menyebabkan anak hidup sebagai anak jalanan. Kebanyakan anak bekerja di jalanan bukanlah atas kemauan mereka sendiri melainkan 60% diantaranya karena dipaksa oleh orang tuanya. Dikalangan keluarga miskin anak-anak yang bekerja di sektor informal (pekerja anak jalanan) biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga

atau rumah tangganya. Kemampuan anak untuk memberi kontribusi terhadap penghasilan yang diperoleh keluarga merupakan suatu nilai positif bagi anak sehingga orang tua mau tidak mau tetap meminta mereka untuk bekerja (Suyanto, 2004).

Departemen Sosial (dalam Terloit 2001) membuat suatu definisi operasional dari anak jalanan, yaitu anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya. Mereka biasanya berusia 6-16 tahun, masih sekolah atau sudah putus sekolah, tinggal dengan orangtua maupun tidak, atau tinggal di jalanan sendiri maupun dengan teman-temannya, dan mempunyai aktivitas di jalanan, baik terus-menerus maupun tidak.

Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur - unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial sosial. Dalam keadaan normal terdapat integrasi serta keadaan yang sesuai pada hubungan-hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Pertama adalah unsur lembaga pendidikan, kedua agama, ketiga kebiasaan, keempat moral sosial, kelima politik, keenam moral, dan ketujuh ekonomi. Apabila antara unsur-unsur tersebut terjadi benturan, maka hubungan-hubungan sosial akan terganggu sosial akan terganggu sehingga mungkin akan terjadi kegoyahan dalam kehidupan (Soekanto, 2004).

Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, psikologis

dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang berhubungan dengan kesejahteraan kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental serta penyesuaian diri individu dalam kelompok sosial. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial (Soekanto, 2004).

Anak jalanan adalah “anak-anak yang berada pada rentan usia wajib belajar 9 tahun (dibawah 18 tahun) yang menghabiskan sebagian waktunya atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang guna memertahankan hidupnya” (Ishaq, 1998). Anak jalanan merupakan asset bangsa karena nasib bangsa dan negara ada ditangan generasi muda, maka generasi muda harus kaya akan informasi baik itu pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Sanggar Alang-Alang yang didirikan oleh Haji Didit Hape tersebut ternyata mendapatkan respon yang sangat positif dan menjadi kebanggaan bagi anak jalanan, karena mereka “anak jalanan” merasa ada yang memperhatikan. Haji Didit Hape tidak pernah menyebut anak alang-alang sebagai anak jalanan. Beliau menyebutnya dengan anak negeri. Anak jalanan merupakan anak negeri generasi bangsa yang perlu mendapat perhatian kita semua. Ini sesuai dengan UUD '45 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “Fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Tetapi pada kenyataannya, anak-anak jalanan terlantar dan tidak mendapatkan haknya. Mereka yang seharusnya berkarya, belajar, harus bekerja demi menopang hidup keluarganya. “Kalau ada pegawai negeri yang disantuni negara, kenapa tidak ada anak-anak negeri

yang dibiayai negara?” saat berbincang 18 November 2013 dengan Haji Didit Hape mengenai anak jalanan.

Persoalan anak jalanan lazim kita temui di kota-kota besar, sebagai efek dari ketidakmerataan ekonomi maka penduduk yang berada di desa berbondong - bondong mengadu nasib di kota dengan harapan bisa meraih masa depan ekonomi yang lebih layak, maka raksasa urbanisasi mulai melangkah kaki menuju lapangan metropolitan baik secara legal maupun ilegal. Hal ini mencerminkan bahwa persoalan anak jalanan merupakan persoalan lintas wilayah administratif.

Beberapa tahun terakhir ini di Indonesia, perhatian sebagian warga masyarakat terhadap kehidupan anak-anak makin meningkat. Hal ini didorong oleh rasa kemanusiaan dan kondisi anak yang makin terpuruk. Kini, sosok anak-anak di Indonesia tampil dalam kehidupan yang kian tak menggembirakan. Hal itu tampak dari kian meningkatnya jumlah anak jalanan.

Kondisi anak-anak yang kian terpuruk hanya teramati dari tampilan fisiknya saja. Padahal di balik tampilan fisik itu ada kondisi yang memprihatinkan, bahkan kadang-kadang lebih dahsyat. Kondisi ini disebabkan oleh makin rumitnya krisis di Indonesia seperti: krisis ekonomi, hukum, moral, dan berbagai krisis lainnya (Andri, 2010).

Fenomena anak jalanan bukan hanya merupakan monopoli negara-negara berkembang, tetapi di negara-negara maju juga banyak bermunculan fenomena tersebut. Dalam istilah sosiologi, gejala tersebut sering dinamakan dengan *deviant behavior* atau perilaku yang menyimpang dari tataran masyarakat. Negara Indonesia

yang notabene sebagai negara dunia ketiga, tidak lepas dari masalah anak jalanan. Banyak faktor yang menstimulasi munculnya fenomena anak jalanan, di antaranya adalah terpuruknya perekonomian bangsa akibat multi krisis sejak tahun 1997 (Nugroho, 2000:77).

Setiap orang memiliki harapan dan cita-cita serta mimpi yang ingin diwujudkan. Sama seperti yang diinginkan mereka anak-anak jalanan, walaupun mereka tetap memiliki harapan tidak memiliki sesuatu yang menonjol dalam dirinya. Di dalam keputusan anak jalanan sebagai anak jalanan bukan tanpa alasan, tetapi mereka mempunyai sebab mengapa mereka melakukan hal itu. Banyak faktor dan penyebabnya seperti masalah keluarga dan masalah ekonomi merupakan faktor yang mendorong mereka untuk menjadi anak jalanan.

Faktor yang dilakukan mereka pun beragam mulai dari manajemen, menjadi penjual asongan, hingga pengemis. Semua itu untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka dan kebutuhan fisik keluarga mereka. Menurut M. Ishaq (2000), ada tiga kategori kegiatan anak jalanan, yakni : mencari kepuasan, mengais nafkah; dan tindakan asusila. Kegiatan anak jalanan itu erat kaitannya dengan tempat mereka mangkal sehari-hari, yakni di alun-alun, bioskop, jalan raya, simpang jalan, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, dan mall.

Keadaan kota mengundang maraknya anak jalanan. Kota yang padat penduduknya dan banyak keluarga bermasalah yang membuat anak kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak

untuk bermain, bergembira, bermasyarakat, dan hidup merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya, fisik, seksual, oleh keluarga, teman, orang lain lebih dewasa. Diantara anak-anak jalanan, sebagian ada yang sering berpindah antar kota, mereka tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif.

Seorang anak yang terhempas dari keluarganya, lantas menjadi anak jalanan disebabkan oleh banyak hal. Penganiayaan kepada anak merupakan penyebab utama anak menjadi anak jalanan. Penganiayaan itu meliputi mental dan fisik mereka, lain dari pada itu, pada umumnya anak jalanan berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat dan ekonominya lemah.

Anak jalanan, pada hakikatnya, adalah "anak-anak", sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak jalanan. Mereka membutuhkan pendidikan. Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab, anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa. Kita tak cukup memberinya makan dan minum saja, atau hanya melindunginya di sebuah rumah, karena anak membutuhkan kasih sayang.

Menguak kehidupan anak jalanan terkesan seperti membuka lembaran hitam perjalanan manusia. Anak-anak yang selayaknya menikmati dunia kanak-kanaknya dengan belajar, berkreasi, mendapat bimbingan dan kasih sayang keluarga, serta berkembang secara wajar seiring dengan pertumbuhan usianya, nyatanya berada

dalam situasi yang jauh berbeda. Anak-anak telah terpaksa atau dipaksa untuk mengarungi kehidupan yang sangat berat, syarat konflik, penuh dengan kekerasan dan eksploitatif. Mereka harus berposisi sebagai orang dewasa kecil yang berjuang menapaki hidup untuk memperoleh nafkah bagi dirinya dan keluarganya, walaupun terkadang berbagai ancaman membayangi kehidupan mereka.

Tentu di dalam konteks kenegaraan, pemerintah merupakan aktor utama dalam menanggulangi persoalan anak jalanan tetapi pemerintah bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab. Peran aktif dari masyarakat sendiri baik organisasi masyarakat, LSM, Yayasan, Paguyuban serta masyarakat setempat sangat dibutuhkan. Selama ini kita telah mendengar banyak lembaga-lembaga kemasyarakatan aktif menangani masalah anak jalanan, namun belum ada kemajuan yang signifikan. Berangkat dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peran Komunitas Peduli dalam Pemberdayaan Anak Jalanan (Studi Kasus Pendampingan Anak Jalanan pada Sanggar Alang-alang di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari realitas di atas, muncul pertanyaan mengapa masyarakat yang tidak kekurangan secara ekonomi khususnya anak - anak mau menekuni profesi menjadi anak jalanan, bahkan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, penelitian ini difokuskan untuk melihat secara sosial berbagai hal menyangkut keberadaan komunitas anak jalanan di Sanggar Alang-Alang. Agar penelitian ini lebih terarah

sesuai dengan tujuan yang di harapkan pada akhir penelitian maka peneliti membatasi masalah penelitian kedalam rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana peran Komunitas Peduli Sanggar Alang-alang dalam proses pemberdayaaan Anak Jalanan ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai :

Mendeskripsikan peran komuitas peduli pada Sanggar Alang-alang dalam proses pemberdayaan anak jalanan.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian, dibagi menjadi dua yaitu secara praktis dan teoritis.

a. Praktis

1. Masyarakat : Sebagai salah satu upaya untuk mendorong masyarakat lain dalam peningkatan kualitas hidup anak jalanan.
2. Penulis : Ingin menambah pengetahuan baru mengenai penanganan anak jalanan melalui pemberdayaan.
3. Sanggar Alang-alang : sebagai masukan bagi Sanggar Alang-alang untuk menambah dalam upaya pemberdayaan untuk anak jalanan

b. Teoritis

Akademik : sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemberdayaan anak jalanan.

1.5 Kerangka Teori

Menurut Sugiono (2005: 55) kerangka teori merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Teori adalah konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian.

1.5.1 Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Fathur Rizqi Abdullah, salah satu mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas FISIB di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), tahun 2009 yang berjudul Anak Jalanan Surabaya di Wonokromo. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dikhususkan pada kekerasan terhadap anak jalanan masih banyak yang berawal dari kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga atau keluarga, dan serta masih kurang adanya perhatian yang sangat perhatian yang sangat lebih kepada anak dari orang tuanya. Dalam kekerasan pada anak jalanan masih banyak yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait baik dari pihak petugas keamanan, petugas kepolisian, serta pihak Instansi pemerintah terkait, dan juga keikutsertaan para preman terminal yang juga melakukan tindak kekerasan.

Kekerasan pada anak jalanan masih sering berlangsung dengan kasat mata yang dilakukan oleh berbagai kalangan yang merasa bias memanfaatkan dengan adanya keberadaan mereka di terminal. Keberadaan anak jalanan pada saat ini masih

di anggap sebagai sampah kota dan sampah masyarakat. Serta kurangnya perhatian dari berbagai pihak yang mulai dari pihak pemerintahannya maupun dari pihak masyarakatnya.

Hasil penelitiannya adalah anak jalanan di Wonokromo yang sudah bekerja, padahal mereka harusnya bermain dan bersekolah, namun tutunan untuk bekerja menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan secara langsung dan ketertekanan berbagai pihak, kebutuhan ekonomi, keterpaksaan karena permintaan dari orang tua, dan ajakan teman adalah yang menjadikan anak turun ke jalan.

Penelitian tentang anak jalanan juga dilakukan oleh Ida Nur Janah salah satu mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas FISIB (2012), yang berjudul Strategi Kelangsungan Hidup Anak Jalanan Di Pelabuhan Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Di dalam penelitian kali ini menggunakan metode prespektif deskriptif kualitatif. Prespektif deskriptif kualitatif adalah prespektif kualitatif yang bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikannya.

Dalam penelitian Ida Nur Janah menjelaskan bahwa anak jalanan di Pelabuhan Kamal sesungguhnya adalah anak yang termarginalkan karena melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, tidak terpenuhi hak-haknya sebagai anak, dan tidak menajikan prospek apapun untuk masa depannya, rentan dan rawan dari segi kesehatan, sosial, hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan jiwa karena resiko yang harus ditanggung dengan jam kerja kurang lebih 9-10 jam perhari walaupun mereka tidak mau disebut sebagai anak jalanan.

Sebagai bagian dari pekerja anak yang berlokasi di Pelabuhan Kamal, sesungguhnya mereka terbilang homogeny yang dapat dikelompokkan secara umum dalam *children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. sebagian penghasilan mereka di jalan di berikan kepada orang tuanya. Fungsi anak jalanan adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tua atau sebagai orang tua tunggal.

Selama ini anak jalanan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Padahal, sama halnya dengan anak-anak pada umumnya, mereka memiliki hak untuk memperoleh pendidikan memadai ang dapat meningkatkan taraf hidupnya dimasa depan kelak. Pendidikan tersebut tidak selalu diberikan dalam bentuk pedidikan formal (pendidikan sekolah), tetapi dapat juga diberikan dengan cara penyediaan akses informasi yang memadai.

Dari deskripsi di atas menggambarkan betapa masalah anak jalanan menjadi masalah yang kompleks. Pembinaan apapun yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak jalanan akan berakhir sia-sia jika kerangka pikir yang digunakan hanya menggunakan pendekatan teknis tanpa menyentuh hal-hal sunstantial seperti perubahan struktur sosial yang mendukung kesejahteraan sosial. Struktur sosial yang kemudian membentuk anak jalanan inilah yang seharusnya digali oleh pemerintah.

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Teori Rekayasa Sosial (Social Engineering)

Rekayasa Sosial adalah *social engineering* yaitu sebagai perubahan sosial yang direncanakan. Dalam hal ini pengertian rekayasa sosial menunjukkan makna yang lebih luas atau lebih pragmatis. Karena, pada dasarnya suatu rekayasa mengandung sebuah perencanaan diimplementasikan hingga teraktualisasikan di alam nyata (Dimitri dalam Rakhmat 2000: vi).

Rekayasa sosial terjadi karena terdapat beberapa kesalahan pemikiran manusia dalam memperlakukan masalah sosial yang disebut para ilmuwan dengan sebutan *intellectual cul-dec-sac* yang menggambarkan kebuntuan berfikir, salah satu bentuk kesalahan pemikiran lainnya adalah permasalahan sosial yang kerap dikaitkan dengan mitos ataupun kepercayaan manusia akan suatu gerakan abstrak ilusi yang tanpa disadari dapat merubah tatanan kehidupan bermasyarakatnya. Untuk itu perlu diadakannya rekayasa sosial agar kesalahan-kesalahan berpikir seperti ini dapat diatasi sehingga masyarakat dapat melihat permasalahan yang dihadapinya sebagai sesuatu yang konkrit (Rakhmat 1999: 167).

Rekayasa sosial timbul akibat adanya sentimen atas kondisi manusia, untuk itu perlu adanya perombakan yang dimulai dari cara pandang atau paradigma manusia atas sebuah perubahan. Dinamika sosial yang terjadi ditengah masyarakat, maka kita akan dapati perubahan selalu berjalan seiring dengan dinamika itu. Terdapat 2 macam Perubahan Sosial yakni perubahan sosial yang tidak direncanakan (*unplanned social change*) dan perubahan sosial yang direncanakan (*planned social change*). Perubahan

yang direncanakan itu disebut dengan berbagai istilah, ada yang menyebutnya dengan istilah *social engginering*. Ciri utama perubahan sosial yang tidak direncanakan yaitu terjadi secara terus menerus dan perlahan-lahan tanpa ada yang mengarahkan dan merencanakan.

Perubahan pada model tidak direncanakan (*unplanned social change*) ini lebih sering merupakan akibat perkembangan teknologi, pengetahuan dan globalisasi, perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang disengaja dan memiliki cara dan teknik tertentu biasanya melalui rekayasa sosial atau yang biasa disebut *Scsial engineering* adalah pergerakan yang menginginkan adanya perubahan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, karena ketika kita menetapkan akan mewujudkan masyarakat yang lebih maka sesungguhnya kita telah menetapkan sebuah desain akhir dari proses yang akan kita lakukan.

Sanggar Alang-alang melakukan sebuah Rekayasa sosial (*Social Engginering*) untuk merubah Anak jalanan menjadi yang lebih baik. Bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam Sanggar Alang-alang Joyoboyo yang telah di rencanakan, di desain, dan di tetapkan tujuan dan menggunakan strateginya (*planned social change*) atau perubahan sosial yang terencana ini bisa di katakan sukses dalam pemberdayaannya.

Strategi-strategi dalam perubahan sosial dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Perubahan sosial bisa juga dilakukan dengan revolusi atau *people's power*.

Revolusi atau *people's power* merupakan bagian dari *power strategy* (strategi perubahan sosial dengan kekuasaan) dan revolusi merupakan puncak dari semua bentuk perubahan sosial. karena menyentuh segenap sudut dan dimensi

sosial secara radikal, massal, cepat, mencolok dan mengundang gejolak intelektual dan emosional dari semua orang yang terlibat didalamnya.

2. Strategi perubahan yang lainnya adalah *persuasive strategy* (strategi persuasif). Dalam strategi ini, media massa bisa sangat berperan. Karena pada umumnya, strategi persuasif dijalankan lewat pembentukan opini dan pandangan masyarakat yang tidak lain melalui media massa J.A.C Brown memasukkan propaganda dalam strategi *persuasive* untuk melakukan perubahan sosial.
3. Dan yang terakhir adalah strategi *normative-reeducative* (normatif-redukatif). *Normative* adalah kata sifat dari *norm* (norma) yang berarti aturan yang berlaku di masyarakat. Posisi kunci norma-norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat telah diakui secara luas oleh hampir semua ilmuwan sosial (Rahmad 2000:53 54).

Rekayasa sosial kita lakukan karena munculnya problem-problem sosial (*social problems*). Sebelum ada problem sosial, tidak akan ada orang berpikir untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Jadi, munculnya problem sosial yang mesti segera diatasi merupakan faktor utama dalam melakukan rekayasa sosial.

Perubahan sosial bisa terjadi karena munculnya *social movement* (gerakan sosial). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), walaupun kecil, termasuk gerakan sosial. Berbagai LSM di luar negeri telah terbukti dapat menimbulkan perubahan sosial. Yayasan yang juga dapat berfungsi sebagai organisasi gerakan sosial (Rakhmat 2000: 48).

1.5.2.2 Teori Pemberdayaan

Suatu diskursus pemberdayaan selalu akan dihadapkan pada fenomena ketidakberdayaan sebagai titik tolak dari aktivitas pemberdayaan. Ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat telah menjadi bahan diskusi dan wacana akademis dalam beberapa dekade terakhir ini. Di Indonesia, diskursus pemberdayaan semakin menguat berkaitan dengan penguatan demokratisasi dan pemulihan (*recovery*) krisis ekonomi. Kieffer dalam Edi Suharto (1998:211) mendeskripsikan secara konkrit tentang kelompok mana saja yang mengalami ketidakberdayaan yaitu; “kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat seperti masyarakat kelas ekonomi rendah; kelompok miskin, usaha kecil, pedagang kaki lima, etnis minoritas, perempuan, buruh kerah biru, petani kecil, umumnya adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan”.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan sosial, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997).

Menurut Kieffer (1981), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif (Suharto, 1997: 215). Parsons et.al. (1994:106) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan (Parsons et.al., 1994: 106).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Definisi pemberdayaan yang dikemukakan para pakar sangat beragam dan kontekstual. Akan tetapi dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa *pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri* (Suharto, 2004).

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat 5P, yaitu; Pemungkinan, Perlindungan, Penyongkongan, dan Pemeliharaan (Suharto, 1997;218-219):

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyongkongan: memberikan perlindungan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyongkong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Adapun dari pelaksanaan penerapan pendekatan pemberdayaan, peneliti menggunakan 2 pendekatan secara penguatan dan penyongkongan. Alasan dari penguatan adalah dalam pemberdayaan ini harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian, serta pendekatan secara penyongkongan ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas dalam kehidupannya.

1.5.3 Landasan Konseptual

1.5.3.1 Definisi Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekanto 2002: 237). Dalam situasi stabil, peran atau role tidaklah sekedar kesempatan melakukan tindakan, tetapi lebih dari pada itu adalah cara bagaimana kontak dan komunikasi seharusnya dilakukan (Usman, 2004: 70).

Menurut Friedman, M. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun

secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman, M, 1998 : 286).

Dan menurut Linton, R. Peran adalah *the dynamic aspect of status*. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya. Perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat berhubungan erat dengan peran. Karena peran mengandung hal dan kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga di masyarakat.

1.5.3.2 Komunitas Peduli

Pengertian dari Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

Komunitas berasal dari bahasa Latin *communitas* yang Definisi Arti Komunitas berarti "kesamaan", kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang berarti "sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak. Istilah kata Arti Komunitas berasal dari bahasa latin *communitas* yang berasal dari kata dasar *communis* yang artinya masyarakat, publik atau banyak orang. Soenarno (2002), juga menjelaskan

bahwa adalah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional.

Peduli adalah suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan terhadap masalah orang lain. Komunitas peduli merupakan wadah untuk menampung aspirasi individu dan lembaga atau perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap dhuafa dan mempunyai minat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kepedulian dan mengenalkan kemandirian kepada sesama (Lagziz, 2010).

Dalam komunitas Sanggar Alang-Alang di Surabaya ini wadah bagi anak jalanan untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Sejujurnya saja anak jalanan tidak ada rasa ingin menjadi seperti itu. Dengan adanya komunitas peduli untuk anak jalanan menjadi lebih baik karena, semakin banyak yang peduli dengan nasib mereka yang susah hidup dijalanan mencari nafkah bisa mengembangkan potensi mereka atas yang di ajarkan dalam komunitas tersebut.

Dalam Sanggar Alang-alang yang dimaksudkan kedalam sebagai komunitas yang peduli Alang-alang adalah orang-orang atau pihak yang terkait untuk membantu dan menjadikan para anak negeri untuk berdaya. yang termasuk komunitas peduli Sanggar alang-alang yaitu

- Para fasilitator atau pendamping sanggar alang-alang
- Dinas-dinas yang terkait : Kementrian Sosial Pusat (Kemensos), Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas), Dinas Pendidikan (Dispen)

- TV Lokal Surabaya TVRI dan TRANS TV, pihak yang terkait dalam mengembangkan alang-alang.
- Beberapa EO (*event organizer*) penyelenggara acara, berbagai CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan beberapa perusahaan yang mendukung dan ikut serta dalam pemberdayaan tersebut.

Peran dari fasilitator atau pendamping adalah sebagai konselor, fasilitator, pemberdayaan, pembela, mediator. Dari pemberdayaan yang dilakukan oleh para fasilitator atau pendamping tersebut kepada anak-anak diajarkan melalui pemberdayaan, pembelajaran melalui pembelajaran menggambar, melukis, membatik, membuat kerajinan, dan lain sebagainya.

Dinas-dinas yang terkait juga berperan memberikan sosialisasi kepada Sanggar, beberapa EO (*event organizer*) penyelenggara acara, berbagai CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan beberapa perusahaan juga memberikan bantuan berupa beasiswa kepada anak alang-alang yang berprestasi, serta memberikan bantuan berupa seragam, renovasi dan lain sebagainya.

Pemberdayaan yang diikuti dengan rekayasa sosial terhadap keberlangsungan Alang-alang ini karena munculnya problem-problem sosial yang masuk kedalam diri anak alang-alang. Dengan adanya pemberdayaan serta rekayasa sosial yang dilakukan oleh para pihak yang terkait untuk menciptakan anak yang mandiri, serta tidak melakukan hal-hal yang semestinya turun ke jalan.

1.5.3.3 Pemberdayaan Anak Jalanan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan perilaku dan control. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal :

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis (Edi, 2006: 57-58).

Pada intinya *empowerment* dapat di artikan sebagai berikut : “membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan

kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan”.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi, mengontrol atas, dan mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, dalam Suharto 1994).

Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Suharto, 2006).

Menurut Ife (dalam Suharto, 1995: 61-64), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :

- Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginan.

- Ide atau gagasan: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi (Edi, 2006; 59).

Pemberdayaan adalah proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Adanya proses perubahan sosial dalam proses pemberdayaan, dari yang pasif akhirnya menjadi lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya yang lebih semangat untuk mengubah nasibnya.

Dalam Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 11 dijelaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (Redaksi Sinar Grafika, 2003;6-7). Hal ini

seharusnya juga didapatkan oleh anak jalanan. mereka memiliki hak yang sama dalam perlindungan anak.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses (Edi, 2006; 59).

1.5.3.4 Anak Jalanan

Di Indonesia, keluarga miskin, masyarakat miskin, dan terlebih lagi bagi anak-anak yang terkategori rawan dan terlantar. Situasi krisis adalah awal mula dari timbulnya berbagai masalah seperti makin mustahil untuk dipecahkan dalam satu singkat. Situasi krisis ekonomi bukan cuma melahirkan kondisi kemiskinan yang paling parah. Tetapi juga, menyebabkan situasi menjadi amat sulit. Krisis ekonomi, meski bukan merupakan satu-satunya faktor pencipta anak-anak rawan. Khususnya bagi anak-anak yang tergolong anak-anak rawan atau anak-anak terlantar (Irwanto dkk, 1998 dalam Suyanto & Sudarso, 2003:3).

Penggunaan istilah anak jalanan berimplikasi pada dua pengertian yang harus dipahami. *Pertama*, pengertian sosiologis, yaitu menunjuk pada aktifitas sekelompok anak yang *keluyuran* di jalan-jalan. Masyarakat mengatakan sebagai kenakalan anak, dan perilaku mereka dianggap mengganggu ketertiban sosial. *Kedua*, pengertian

ekonomi, yaitu menunjuk pada aktifitas sekelompok anak yang terpaksa mencari nafkah di jalanan karena kondisi ekonomi orangtua yang miskin (Nugroho, 2000: 78).

Jika anak jalanan berada dalam ikatan kerja baik formal maupun nonformal dimana kepentingan perkembangan dan perlindungan yang memadai. Anak yang bekerja di jermal atau anak-anak yang di lacurkan, jelas mereka adalah anak-anak yang sangat beresiko untuk melanggar haknya (Hariadi dan Suyanto dalam Suyanto & Sudarso, 2003: 17).

Mesti tidak terlalu terjadi, bahwa latar belakang anak-anak memilih hidup di jalanan adalah karena kasus *child abuse* (tindakan yang salah pada anak-anak). Bagi anak jalanan sendiri, sub kultur kehidupan urban menawarkan kebebasan, kesetiaan dan dalam taraf tertentu juga “perlindungan” kepada anak-anak yang kabur dari rumah akibat diperlakukan salah telah menjadi aya tarik yang luar biasa. (Farid, 1998; dalam Suyanto & Ariadi, 2003: 14).

Ada beberapa pengertian anak jalanan menurut beberapa ahli hukum, antara lain:

- a. Sandyawan memberikan pengertian bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang berusia maksimal 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan waktunya di jalanan.
- b. Peter Davies memberikan pemahaman bahwa fenomena anak-anak jalanan sekarang ini merupakan suatu gejalaglobal. Pertumbuhan urbanisasi dan membengkaknya daerah kumuh di kota-kota yang paling parah keadaannya adalah di negara berkembang, telah memaksa sejumlah anak yang

semakin besar untuk pergi ke jalanan ikut mencari makan demi kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri (Davies, 1994: 69).

Anak jalanan pada dasarnya adalah bagian dari kelompok warga kota yang tergorong marginal, rentan, dan miskin. Sebagian anak jalanan masih memiliki sanak-keluarga, dan bahkan masih tinggal dengan kedua orang tuanya. Tetapi, tidak sedikit anak jalanan yang benar-benar menggelandang di jalanan : hidup beratapkan langit dan baralaskan bumi. Anak jalanan seperti ini, mereka bias ditemui di zone-zone publik, seperti terminal, stasiun kereta api, emperan toko. Di bawah kolong jembatan, bersembunyi di kesunyian makam, menyendiri di keramamaian pasar atau hidup hidup di sepanjang sten kali layaknya gelandangan. Aktivitas yang dilakukan anak – anak jalanan cukup bervariasi, misalnya menjadi pengamen, pengasong, penyemir spatu, ojek payung, kernet, pengemis, membantu bekerja di bengkel, membantu berjualan, atau ada pula yang berkeliaran tak menentu (Cahyana, Sudarso, Suyanto, dkk, 2004; 78).

1.5.3.5 Pendampingan Anak Jalanan

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat erencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Proses tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional (Suharto, 2006: 93).

Anak jalanan seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Pendampingan sosial kemudian hadir sebagai agen perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara anak jalanan dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi permasalahan.

Dalam pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni :

1. Pemungkinan atau Fasilitasi

Merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas bagi pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun consensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.

2. Penguatan

Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*). Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.

3. Perlindungan

Fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendampingan dengan lembaga – lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat

dampingannya. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.

4. Pendukungan

Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat (Suharto, 2006: 95-97).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian. Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui metode Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Arti dari metode Kualitatif ini adalah data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

Pendekatan dengan metode studi kasus menurut Andi Prastowo (2011: 129) adalah “metode penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendetail terhadap suatu kasus, yang berupa peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan untuk mengungkapkan atau memahami sesuatu hal”.

Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisi data induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi (Moleong, 2005: 4).

Pada uraian di atas, dapat kita pahami bahwa metode pendekatan kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.

1.6.2 Subyek Penelitian

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik menentukan informan dengan menggunakan *Sampling Purposive*. Pengertian dari *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,

2012: 85). Teknik ini cara menentukan informan di tentukan sendiri oleh peneliti, dalam penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang tidak melakukan generalisasi.

Peneliti menentukan beberapa informan dengan kriteria sebagai berikut Subyek utama dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat didalam penelitian ini. *Pertama*, fasilitator atau yang lebih umumnya dikenal dengan pendamping anak-anak di sanggar alang-alang. Peneliti menentukan informan pendamping dikarenakan sudah memenuhi criteria penelitian, pendamping sudah bekerja cukup lama lebih dari 6 tahun dan pendamping mengetahui tentang seluk beluk pemberdayaan yang dilakukan sanggar. Pendamping juga yang senantiasa mendidik anak-anak didalam sanggar alang-alang, membantu anak yang berada dijalanan yang kekurangan dalam hal pendidikan atau keterampilan.

Kedua, Anjal atau yang lebih dikenal dengan anak jalanan. Anak yang biasanya beraktivitas jalanan tetapi sudah berada di lingkup sanggar alang-alang, aktivitas yang biasa dilakukan oleh anak ini adalah mengamen, pengasong, penyemir sepatu pengemis dan lain-lain yang sebagian aktivitas berada dijalanan. Alasan peneliti menjadikan anak jalanan sebagai informan karena, anak jalanan yang berada pada pemberdayaan sanggar mengetahui dan mengalami secara langsung tentang pemberdayaan yang dilakukan sanggar. Anak yang dijadikan sebagai informan sudah lama berada di sanggar kurang lebih 4 tahun dan lebih lama dibanding anak yang lain.

Subyek penelitian yang *ketiga*, masyarakat sekitar atau tokoh masyarakat yang berada di sekitar tempat sanggar alang-alang. Masyarakat yang mengetahui akan adanya sanggar alang-alang yang diperuntukan untuk anak- anak yang sebagian hidup

dijalanan dan warga atau masyarakat tersebut mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh sanggar. Masyarakat yang dijadikan sebagai informan berlokasi di sebelah sanggar alang-alang bertepatan di sebelah utara berjarak dua rumah dari sanggar alang-alang.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapang. Berdasarkan sumber data, teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu data sekunder dan data primer.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi berbagai instansi pemerintah. Data sekunder dari penelitian ini juga di ambil dari : Majalah, Dokumentasi berupa foto bersama informan, Buletin atau Koran, Publikasi dari Sanggar Alang-Alang Surabaya, hasil studi, tesis, skripsi, internet, hasil survey, dan sebagainya

b. Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh dari lapangan atau tempat penelitian (Nasution, 2006: 143). Sedangkan menurut Loftand bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan (dalam Moleong, 2007:157). Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Data primer dari

penelitian ini di ambil melalui observasi dan wawancara kepada pihak terkait untuk mendapatkan sumber data yang dimaksudkan.

Studi kepustakaan yang dimaksud adalah untuk memperoleh data sekunder (literature-literatur yang mendukung), sedangkan studi lapang dilakukan untuk memperoleh data primer dari subyek penelitian. Data primer digali dengan menggunakan metode pengamatan (*observation*), dan wawancara.

1. Observasi

Sutrisno Hadi (1987: 136) menerangkan bahwa pengamatan (observasi) merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Sementara observasi partisipan adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan, serta dalam kehidupan objek pengamatan. Dengan demikian, pengamat betul-betul menyelami kehidupan budaya mereka (Bungin, dalam Prastowo, 2010:40-41).

2. Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Metode Wawancara juga biasa disebut dengan metode interview atau disebut sebagai metode wawancara. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai (Sutrisno Hadi, 1986).

Wawancara mendalam (*Indepth Interview*), pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan

makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2007: 72). Atau dengan kata lain, pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang serupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan Tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu (Prastowo, 2010:145).

Teknik wawancara mendalam (*Indepth Interview*) pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan teknik wawancara lainnya. Hanya saja peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informan, dan cara melakukan wawancara pada umumnya. Sesuatu yang amat berbeda dengan teknik wawancara lainnya, yakni wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian (Prastowo, 212-213).

Tujuan dari pada wawancara itu di tujukan kepada anak jalanan itu sendiri yang berada dalam lembaga tersebut yang menerima pendidikan didalamnya, fasilitator atau pendamping di dalam suatu lembaga tersebut, masyarakat sekitar atau tokoh masyarakat.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2006: 280). Pohan (2007: 93), data kualitatif adalah semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara matematis kerana berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata).

Dari rumusan diatas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar, peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman melalui tiga proses, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi (Moleong, 2006).

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data berupa data sekunder dari berbagai referensi buku, dan data primer data yang berasal dari wawancara subyek penelitian (Murdiyatmoko, 2006: 100).

b. Penyajian Data

Penyajian data disini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pengambilan data merupakan proses pemaparan informasi yang diperoleh sistematis dan menyeluruh dari data yang didapatkan melalui wawancara mendalam (*indepht interview*) pada staf-staf yang berada didalam sanggar alang-alang dan anak jalanan yang berada dalam sanggar tersebut (Murdiyatmoko, 2006: 100).

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Dalam penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan kesimpulan berdasarkan data interpretasi peneliti. Data tersebut dipaparkan secara sistematis dan menyeluruh sehingga ditemukannya satu titik kesimpulan.

1.6.5 Keabsahan Data

Menurut Moleong Kriteria keabsahan data ada empat yaitu : Kepercayaan (*kreadibility*), Keralihan (*tranferability*), Kebergantungan (*dependibility*), Kepastian (*konfermability*) (Moleong, 2005: 270). Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memakai keabsahan data Kepercayaan (*kreadibility*) yang berarti Kreadibilitas data yang dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa tehnik untuk mencapai kreadibilitas ialah tehnik triangulasi sumber, pengecekan anggota, perpanjangan peneliti dilapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecakupan refrensi.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu, suatu teknik pengecekan kedibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Pengumpulan dan pengujian data yang kita peroleh dilakukan kebawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan keteman kerja yang merupakan kelompok kerja sama

1.6.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Yayasan Pendidikan Sanggar Alang-Alang, yang beralamatkan lengkap di Jl. Gunung Sari No.24 Surabaya. Alasan yang

diperuntukan untuk penelitian yaitu karena Sanggar Alang-alang merupakan salah satu wujud peran yang nyata serta organisasi dan masyarakat dalam membentuk generasi penerus bangsa yang unggul dan bermoral, dalam hal ini melalui pemberdayaan anak jalanan dalam menapak masa mendatang.

1.6.6.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan di Sanggar Alang-alang Surabaya melalui dua tahapan, yang pertama pada bulan november 2013 dilakukan observasi awal guna untuk mengetahui sasaran penelitian. Kedua, dimulai pada bulan mei untuk pengambilan data selama 3 bulan. Diharapkan selama pengambilan data tersebut peneliti memperoleh hasil yang diinginkan.